

Analisis Konflik dan Masalah Sosial di Papua: Upaya Penyelesaian dengan Menelusuri Akar Konflik dan Masalah

Robert Hendrik^{1*}, Endah Ratna Sonya²

1. Program Studi Sosiologi, Universitas Terbuka

2. Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*corresponding author e-mail: rhn.040296@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Conflict; Social problem; Discrimination</p>	<p>Papua is one of the provinces located at the very tip of the eastern part of Indonesia. The Papua region has many natural resources, a good climate, and biodiversity. The condition of Papua's natural wealth seems to be inversely proportional if we talk about social conditions in the region in the last few decades. Since 1963 when Indonesia took over Papua to become part of the Indonesian territory, many conflicts have occurred which have had an impact on social and political life in Papua. The conflict is related to issues of independence, discrimination, and violations of Human Rights (HAM). Another social problem in Papua is social inequality, which includes economics, education, health, territory, and exploitation of natural resources. This research uses a qualitative descriptive approach where the object of this research is the province of Papua. This research aims to analyze the causes of conflict and social problems in Papua. The research method used is descriptive qualitative research. The result of this research is strong commitment and cooperation between the government, the Papuan people, and non-Papuan ethnic groups with a comprehensive and holistic approach that is sustainable. Open dialogue to hear people's aspirations in resolving conflicts and social problems is a form of justice and concern. Implementation of government policies by paying attention to human rights principles with social inclusion will maintain the integrity and unity of society.</p>
<p>Article history: Received 31 May 2023 Revised 9 July 2024 Accepted 9 July 2024 Published 16 July 2024</p>	<p>Abstrak Papua adalah salah satu provinsi yang terletak paling ujung di bagian timur wilayah Indonesia. Wilayah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam, iklim yang baik, dan keanekaragaman hayati. Kondisi kekayaan alam Papua ini seolah berbanding terbalik, bila kita berbicara tentang kondisi sosial di wilayah itu pada beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 1963 ketika Indonesia mengambil alih Papua menjadi bagian dari wilayah negara Indonesia, banyak sejumlah konflik terjadi yang kemudian berdampak pada kehidupan</p>
<p>Info Artikel Kata Kunci: Konflik; Masalah sosial; Diskriminasi</p>	

sosial dan politik di Papua. Konflik tersebut terkait isu kemerdekaan, diskriminasi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah sosial lainnya yang ditemukan di Papua yakni kesenjangan sosial, dimana mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana objek penelitian ini adalah provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik dan masalah sosial yang terjadi di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat Papua, kelompok etnis nonPapua dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang berkelanjutan. Keterbukaan dialog untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan sosial adalah bentuk keadilan dan perhatian. Implementasi kebijakan pemerintah dengan memperhatikan prinsip HAM secara inklusi sosial akan menjaga keutuhan integrasi dan persatuan masyarakat.

Pendahuluan

Papua adalah salah satu provinsi yang terletak paling ujung di bagian timur wilayah Indonesia. Papua memiliki 6 provinsi dengan 4 provinsi yang disebut Daerah Otonomi Baru (DOB) dan 2 provinsi tetap. DOB tersebut merupakan hasil pemekaran pada wilayah sebelumnya yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, dua provinsi lainnya adalah Papua Barat dan Papua. Keempat provinsi baru tersebut secara resmi telah disahkan dalam rapat paripurna DPR ke 26 pada tanggal 17 November 2022. Pembentukan DOB ini bertujuan untuk proses pemerintah memberikan layanan kepada publik lebih masif guna membangun Papua menjadi lebih baik ([Ester Zonggonau, 2023](#)).

Wilayah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam, iklim yang baik, dan keanekaragaman hayati. Kondisi kekayaan alam Papua ini seolah berbanding terbalik, bila kita berbicara tentang kondisi sosial di wilayah itu pada beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 1963 ketika Indonesia mengambil alih Papua menjadi bagian dari wilayah negara Indonesia, banyak sejumlah konflik terjadi yang kemudian berdampak pada kehidupan sosial dan politik di Papua. Konflik tersebut terkait isu kemerdekaan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Masalah sosial lainnya yang ditemukan di Papua yakni kesenjangan sosial, dimana mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam ([Fanggidae, 2016](#)).

Fenomena sosial yang terjadi di Papua seakan mengubah sudut pandang dan pemikiran masyarakat terkait kinerja pemerintah untuk menangani masalah di Papua. Masyarakat mulai mempertanyakan setiap keputusan pemerintah dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, namun justru malah menimbulkan masalah baru lainnya. Banyak aktivis kemanusiaan di Indonesia mempunyai persepsi terhadap

konflik dan masalah sosial di Papua, salah satunya adalah implementasi kebijakan pemerintah pusat yang diteruskan pemerintah daerah ke masyarakat Papua tidak adil dan timpang. Hal ini dilihat dari partisipasi setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat dan daerah yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Papua.

Dalam menganalisis konflik dan masalah sosial di Papua, penelitian ini diperlukan beberapa buku-buku, artikel dan jurnal ilmiah sebagai referensi utama. Analisis ini dapat menjelaskan asumsi masyarakat Papua terhadap pemerintah. Masyarakat Papua menilai bahwa pemerintah hanya mengedepankan kepentingan negara semata bukan rakyat, dengan dalih tujuan untuk pembangunan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan dimana ditemukan beberapa kasus konflik di Papua karena eksploitasi dan sistem kebijakan. Eksploitasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan disalahgunakan, sehingga lebih kepada tidak transparansinya arah pengelolaan. Pembangunan dan pengembangan terus dilakukan oleh pemerintah untuk menggali potensi tersebut, tetapi masyarakat tidak merasakan dampak tujuan dari pembangunan dan pengembangan itu. Kemudian sistem kebijakan yang tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Menurut Webster dalam Pruitt dan Rubin ([Tuhuteru, 2022](#)), mengemukakan bahwa konflik sebagai bentuk perkelahian, peperangan atau perjuangan yang didasari oleh konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Konteks konflik terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Marx menyatakan "...of all instruments of production is the revolutionary class itself"(Dahrendorf, 1959:9). Marx menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi karena perjuangan kelas revolusioner. Konsep ini memang praktis menjelaskan kausalitas tersebut dilihat dari perspektif sosiologi. Konflik dan masalah sosial di Papua saat ini antara lain, konflik masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan kelompok radikalisme, dan masyarakat dengan kelompok radikalisme.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus (otsus) bagi provinsi Papua, tindakan represif maupun persuasif namun hal ini tidak dapat menyelesaikan konflik dan masalah di Papua ([Suropati, 2019](#)). Intensitas ketegangan antara kelompok radikalisme (kelas revolusioner) dengan pemerintah, semakin memperburuk keamanan dan keselamatan masyarakat di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab dan dampak dari konflik dan masalah sosial tersebut. Kontribusi penelitian sebelumnya telah memberikan pengetahuan dan pemikiran kritis dalam membangun solusi guna mengatasi konflik dan masalah sosial ini. Penelitian tersebut antara lain adalah kajian pendekatan hukum internasional dari Sugiyanto (2017) dan Sefriani (2013), kajian pendekatan lembaga internasional sebagai mekanisme penyelesaian konflik dari Febrianti (2019). Kajian bagaimana aspek historis dapat dimainkan bagi legitimasi, dan instrumen politik di dalam konflik antara Pemerintah Indonesia dan nasionalis Papua Barat dari Viartasiwi (2018) dan Safitri (2012) (Febrianti, 2019).

Landasan pemikiran untuk dapat memahami konflik dan masalah sosial di Papua bila dilihat dari sudut pandang teoritis, sebagai berikut.

1. Konflik dan Masalah Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan suatu kerangka berpikir yang dipakai dalam membentuk teori untuk melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang kompleks. Pola tiap-tiap unsur di dalamnya bekerja bersama-sama untuk meningkatkan stabilitas dan solidaritas. Teori ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi (Parwitaningsih, 2019). Teori inilah yang mendasari pemikiran para tokoh seperti Emile Durkheim, Herbert Spencer, Talcott Parsons, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan konteks Papua, konflik dan masalah sosial terjadi akibat ketidakseimbangan atau disfungsi dalam struktur sosial. Misalnya seperti ketidaksetaraan distribusi sumber daya, kesehatan yang terbatas, akses pendidikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan distribusi ini terlihat bagaimana pengelolaan kekayaan alam di Papua yang mampu dimanfaatkan oleh perusahaan asing dan elit lokal. Sementara itu, masyarakat Papua sebagian besar hidup dari pertanian dan perikanan. Ini jelas kontras bahwa perusahaan asing dan elit lokal diuntungkan dari segi ekonomi, sedangkan masyarakat mendapatkan sedikit manfaat dari kekayaan tersebut.

Begitu juga akses layanan publik masyarakat di Papua masih sulit dijangkau dan kurang diperhatikan. Hak untuk berpartisipasi bagi masyarakat Papua juga tampak dibatasi. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat dan konflik antara kelompok-kelompok yang terlibat.

Sistem sosial juga bagian dari suatu struktural. Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial di dalamnya (Nurhayati, 2022). Perubahan ini akan mampu menciptakan kondisi yang lebih seimbang dan stabil dalam struktur sosial mereka. Namun, pada kenyataannya untuk ke arah ini masih banyak ditemukan kendala dan hambatan.

2. Konflik dan Masalah Sosial dalam Perspektif Konflik

Teori konflik merupakan suatu kerangka berpikir yang dipakai dalam membentuk teori untuk melihat masyarakat sebagai suatu ketidaksamaan yang menyebabkan konflik dan perubahan (Parwitaningsih, 2019). Teori ini menganggap konflik sebagai adalah hal yang wajar dan tidak terhindarkan dalam masyarakat. Teori ini mampu menganalisis bagaimana pola-pola sosial menguntungkan bagi beberapa orang tetapi merugikan dan menyengsarakan orang lain, sehingga timbul adanya konflik. Teori inilah yang mendasari pemikiran para tokoh seperti Karl Marx, Max Weber, Lewis Coser, dan sebagainya.

Keterkaitan teori ini dengan konteks konflik yang terjadi di Papua, salah satunya adalah konflik vertikal. Konflik vertikal yakni konflik antara pemerintah dan masyarakat adat Papua. Konflik ini terjadi karena masalah utama aktivitas yang dilakukan pemerintah, seringkali tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Salah satu aktivitas utamanya adalah eksploitasi untuk menggali sumber daya alam yang berpotensi bagi negara. Namun, kerap kali kegiatan ini menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat. Kerugian materil tampak dirasakan oleh masyarakat yang tinggal. Keuntungan sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik mereka diambil alih seluruhnya untuk keuntungan pemerintah.

Selain itu, konflik horizontal antara masyarakat Papua dan nonPapua seringkali terjadi dalam berbagai konteks, seperti akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan. Masyarakat Papua selalu mendapatkan stereotip negatif, mereka dianggap sebagai kelompok tidak berkembang dan tidak beradab oleh beberapa masyarakat nonPapua.

Beberapa bukti konflik di atas mungkin sebagai fenomena yang dikesampingkan (*overridden*). Inti sebenarnya konflik utama selama ini di Papua adalah konflik antara kelompok separatis dengan pemerintah. Eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu menggunakan kekerasan untuk menuntut hak-hak mereka (Kaisupy, 2021). Cara-cara yang mereka gunakan lebih ke arah kekerasan fisik sebagai bentuk revolusi total. Alasan mereka melakukan tindakan demikian karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik di Papua dan tidak memiliki suara. Di sisi lain, akar masalah ini terkait ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan pengaruh sosial.

OPM merupakan organisasi yang mengambil gerakan separatisme demi tujuan untuk memisahkan diri dan ingin memerdekakan wilayahnya sendiri dari kedaulatan Indonesia (Adi, 2019). Pemerintah melabeli organisasi ini sebagai Kelompok Separatis dan Terorisme (KST) yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara. Pemerintah kemudian mengambil langkah konkrit untuk menekan kelompok separatis ini, dengan cara pendekatan militer. Tetapi ada hal lain yang menjadi masalah selanjutnya, yakni masalah keamanan dan keselamatan masyarakat sipil di Papua. Masyarakat sipil yang tinggal di daerah konflik menjadi sasaran utama dari ketegangan konflik kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mencari tahu tentang bagaimana konflik di Papua yang berujung pada pelanggaran HAM dapat memengaruhi keseimbangan dan stabilitas sosial di Masyarakat Papua, apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Papua, dan bagaimana mengatasi konflik dan masalah sosial di Papua untuk menciptakan kondisi yang seimbang dan stabil dalam sistem sosial?

Metode Penelitian

Kegagalan politik orde lama dan baru telah membawa Papua pada situasi pergolakan konflik dan masalah sosial sejak mereka lepas dari tangan Belanda. Konflik ini terkait dengan klaim kemerdekaan, kesenjangan, HAM, dan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat Papua. Sebagai penulis melihat apa yang terjadi di Papua, tertarik untuk membahas kajian ini lebih dalam guna memahami konflik dan masalah sosial di Papua. Hal ini tidak terlepas dari potensi Papua sebagai sorotan problematika di negara ini yang memunculkan isu-isu kompleks dan mempengaruhi kehidupan banyak orang di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana objek penelitian ini adalah provinsi Papua. Menurut Lexy J. Moleong dalam Metodologi Penelitian Kualitatif (Wijaya, 2020) menyatakan bahwa masalah lebih dari sekadar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari dua faktor atau lebih yang memberikan hasil situasi yang membingungkan (Setiawan, 2021).

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh kalangan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang suatu topik atau masalah yang belum dipahami (Soeprapto, 2018). Selain itu, peneliti dapat memberikan gambaran dan pemahaman secara rinci fenomena atau

peristiwa tersebut. Berbagai peristiwa yang ada di Papua, penulis menggiring opini kurangnya kinerja dan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan di wilayah tersebut. Spekulasi yang muncul pada setiap tindakan pemerintah di Papua menjadi hal penting yang harus dikaji ulang.

Melalui penelitian ini, penulis telah mengumpulkan berbagai sumber-sumber aktual dan faktual data yang mengarah kepada studi pustaka, artikel laporan mengenai konflik dan masalah sosial di Papua, dan informasi kasus di Papua. Penulis menggunakan studi pustaka dalam mencari dan mengumpulkan informasi atau argumen, yang dapat dijadikan sumber referensi untuk mendukung penelitian ini. Lalu, artikel laporan dan informasi kasus digunakan sebagai bahan acuan untuk menganalisis pokok utama penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Terbentuknya OPM dan Awal Mula Konflik

Secara historis, Papua yang dulu bernama Irian Barat adalah salah satu wilayah yang masih dikuasai Belanda setelah era kemerdekaan Indonesia. Belanda ingin menjadikan Irian Barat menjadi negara yang Merdeka. Namun kendati ingin merdeka, justru Belanda memilik tujuan menjadikan Irian Barat sebagai negara boneka oleh Belanda. Negara boneka merupakan kedaulatan suatu negara yang dikendalikan oleh negara lain. Meski Indonesia mendapatkan kedaulatannya, pihak Belanda dan Indonesia masih terlibat konflik karena merasa memiliki hak atas wilayah Irian Barat yang disengketakan.

Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akhirnya diserahkan oleh Belanda ke pangkuan NKRI (Susetyo, 2020). Walau begitu Belanda yang masih bertahan di Irian Barat mendirikan sistem pemerintahan sendiri bagi orang Irian Barat dalam mencapai kemerdekaannya. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Papua tidak seluruhnya diserahkan ke Indonesia. Presiden Soekarno yang melihat hal ini kemudian mempersiapkan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Permasalahan ini pada akhirnya berlanjut ke dalam forum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menghasilkan perjanjian New York kala itu. Pihak Belanda bersedia menyerahkan Irian Barat sepenuhnya kepada Indonesia, namun dengan syarat Indonesia melakukan Perpera (Penentuan Pendapat Rakyat). Pepera kemudian dilaksanakan pada tahun 1969, dan hasilnya menyatakan masyarakat Irian Barat memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Pada proses itu secara resmi disahkan oleh PBB dan Irian Barat menjadi wilayah NKRI.

Pada perjalanannya, Papua yang dulu bernama Irian Barat berganti menjadi Irian Jaya pada tahun 2002. Proses integrasi politik di Irian Jaya ini menghadapi suatu tantangan yang berat. Sejak awal pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya selalu dihadapkan kepada berbagai permasalahan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat perkembangan kemajuan di Papua dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Nama Irian Jaya kemudian berganti menjadi Papua setelah diberlakukannya Otsus UU Nomor 21 Tahun 2001.

Orde baru pada era Presiden Soeharto, kondisi Papua kurang mendapat perhatian karena proses pemerintahan yang dijalankan hanya berfokus pada "Jawa Sentris". "Jawa sentris" merupakan pandangan yang cenderung mengutamakan kepentingan dan pembangunan di wilayah Jawa dan sekitarnya. Jawa sebagai kebudayaan dan politik

terpusat di Indonesia, sehingga menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan nasional. Kurangnya perhatian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan terhadap sikap politik pemerintahan, sehingga melahirkan gerakan separatisme. Separatisme ini merupakan penolakan terhadap situasi politik pada saat itu, karena adanya kesenjangan sosial ini yang tidak dapat dihindari. Gerakan separatisme sebagai bentuk tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam satu kesatuan besar ingin memisahkan diri dengan maksud mendirikan negara atau bangsa merdeka dan menjalankan pemerintahannya sendiri (Sefriani, 2016). Hal ini kemudian membentuk ideologi yang bertentangan dengan negara di beberapa kelompok. Salah satunya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tahun 1965.

2. Gerakan Separatisme, Konflik dan Pelanggaran HAM di Papua

Gerakan separatisme OPM ini dimulai tanggal 26 Juli di Manokwari yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom (Mindari, 2022). Ia adalah bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwilinger Corps) pada kolonialisme Belanda di Papua. Menurut penelitian sejarah menunjukkan kelompok OPM memiliki dua faksi utama yakni faksi politik dan militer yang dipimpin Terianus Aronggear, SE dan Aser Demotekay pada rentan tahun 1963 dan 1964 (Pedrason, 2021). Faksi politik OPM mencari dukungan dari negara-negara tetangga yang bernasib sama, sedangkan faksi militer bergerak untuk melakukan pemberontakan (Al Hasyim, 2017). Nama-nama seperti Kelly Kwalik, Tadius Yogi, Mathias Wenda adalah mantan pimpinan dari faksi ini, sedangkan faksi politik saat ini dipimpin Benny Wenda (Hari Purwanto, 2021).

a. Faksi Politik OPM

Faksi politik OPM merupakan faksi yang mencari dukungan internasional guna memperjuangkan kemerdekaan Papua. Faksi politik OPM diantaranya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggunakan aksi-aksi non-kekerasan dan secara damai dalam gerakan mereka (Pamungkas, 2017). Menurut asumsi mereka, proses pembangunan Indonesia di Papua adalah bentuk kolonialisme baru. Pembangunan oleh pemerintah di Papua banyak ditemukan pengabaian hak-hak orang Papua. Termasuk pendekatan yang dilakukan lebih ke arah militerisasi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM bagi orang asli Papua seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Mereka memprotes sistem politik dan pengambilan keputusan oleh pemerintah Indonesia bagi Papua, karena dianggap membatasi dialog dan hak-hak orang Papua.

Namun perihal ini dibantah pemerintah Indonesia yang menyatakan pembangunan di Papua dilakukan semata-mata membuat Papua menjadi lebih baik dan maju (Kaysupi, 2021). Pemerintah juga menekankan bahwa pendekatan militer yang dilakukan di sana demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari potensi konflik yang terjadi. Pemerintah menuduh bahwa kelompok OPM yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran HAM di Papua, mengganggu kestabilan daerah dan keutuhan masyarakat (Septiadi, 2022).

b. Faksi Militer OPM

Faksi militer OPM dibentuk sebagai respon melawan intervensi militer Indonesia di wilayah mereka. Faksi ini menggunakan aksi-aksi kekerasan dalam gerakan mereka yang mengarah pada tindak kejahatan. Faksi militer OPM diantaranya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) (Hari Purwanto, 2021). Kelompok dari faksi ini sering melakukan penyerangan terhadap pihak aparat yang bertugas dan masyarakat sipil yang pro pemerintah. Beberapa daerah di Papua seperti Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Mimika, Jayawijaya, dan Kota Jayapura merupakan basis kelompok ini. Daerah-daerah tersebut berstatus rawan konflik atau tidak aman dan menjadi perhatian pihak aparat kepolisian dan TNI di sana.

Hingga tahun 2018, pemerintah memasukan kelompok ini ke dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) (Matildha, 2022). Pemerintah menggunakan istilah itu karena merujuk pada kekerasan dan tindak kejahatan mereka di Papua dan Papua Barat. Konflik ini tetap berlanjut dan sampai saat ini, sejak kelompok bersenjata ini melakukan gerakan separatis yang berdampak pada konflik bersenjata kedua belah pihak, yakni antara TPNPB atau TPN dengan aparat TNI-Polri di wilayah tersebut (Elisabeth, 2021). Kelompok ini menolak keterlibatan pihak asing dan campur tangan pemerintah Indonesia di tanah Papua. Mereka ingin mengelola dan menjalankan sendiri roda pemerintahan di daerahnya.

Contohnya PT Freeport Indonesia, tercatat telah banyak kasus pembunuhan buruh yang bekerja di sana oleh kelompok tersebut. Salah satu kasusnya adalah penembakan karyawan PT Freeport oleh KKB pada 30 Maret 2020. Penembakan itu menewaskan satu WNA asal Selandia Baru dan dua WNI mengalami luka tembak serius. Baru-baru ini kasus penyanderaan dilakukan oleh KKB terhadap pilot Susi Air yaitu Kapten Phillip Merthens pada 7 Februari 2023, kasus penyerangan KKB di wilayah Nduga kepada aparat TNI-Polri yang menewaskan 6 prajurit dari Yonif Raider 321, dan Pembakaran gedung SD dan SMP di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Papua oleh KKB pada 30 Maret 2022. Kasus-kasus ini sudah menjadi pelanggaran HAM oleh kelompok separatis ini.

Permasalahan di atas menambah panjang daftar tindakan agresif dan destruktif oleh kelompok separatis ini, yang menjadi gangguan internal dalam tubuh negara. Sehingga Aparat gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk turun tangan dalam menangani masalah ini. Eskalasi konflik ini pun menjadi skala yang lebih luas dan berdampak pada kondisi keamanan di Papua.

Di samping itu, keberadaan pihak luar sebagai bentuk investasi asing di tanah Papua seperti PT Freeport Indonesia menambah deretan masalah baru. Konflik ini sebenarnya sudah lama tetapi belum ada kepastian penyelesaian. Kehadiran PT Freeport di Indonesia sejatinya menjadi keuntungan bagi negara dan masyarakat, tetapi faktanya justru merugikan bagi masyarakat Papua. Meski saat ini saham PT Freeport Indonesia telah diambil 51 % oleh Indonesia, namun tetap menimbulkan konflik vertikal. Konflik ini muncul akibat tuntutan ganti rugi terkait hak tanah ulayat dari Suku Amungme dan Komoro sebagai pemilik (Kaisupy, 2021). Di sisi lain, pemerintah belum mencapai kesepakatan dengan kelompok suku tersebut terkait kerugian materil dan inmateril. Mereka tentunya meminta kepastian penanganan dari pemerintah terhadap dampak

lingkungan yang ditimbulkan, karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di tanah Papua.

Lanjut membahas masalah konflik terkait OPM, oleh aktivis kemanusiaan, kelompok organisasi dan berbagai komisi mendesak pemerintah untuk segera melakukan negosiasi dan dialog. Dialog antara Jakarta dan Papua diperlukan guna meredam konflik yang berkelanjutan di Papua (Sihaloho, 2023). Namun kenyataannya proses ini selalu menemui kendala dan berlangsung alot, sedangkan kerugian yang ditimbulkan dari konflik ini tidak dapat dihindari. Isu-isu pelanggaran HAM dan perlakuan diskriminasi menjadi sorotan masalah utama pada konflik tersebut. Ketidakstabilan sosial dan ketidakamanan dapat menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan di wilayah Papua. Dampak ini bisa mengancam masa depan masyarakat Papua jika tetap dibiarkan.

Kepastian hukum akan pelanggaran HAM bagi masyarakat Papua menjadi berat sebelah akibat oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Misalnya kasus penganiayaan warga di Mappi pada 31 Agustus 2022 oleh personel TNI, beberapa diantaranya meski terbukti bersalah tetapi pelaku-pelaku tersebut tidak diadili. Seolah pemerintah menutupi masalah ini dan membiarkan hal itu terjadi. Penegakkan hukum pun yang terlihat bagi masyarakat Papua adalah adanya ketidakadilan (Hardiyanto, 2023).

Konflik dan masalah sosial di Papua membawa pengaruh kepada gambaran sosial orang Papua. Stigma negatif dan sentimen terhadap masyarakat Papua sebagai faktor penyebab masalah tidak luput dari beberapa pandangan golongan-golongan tertentu. Hal ini menjadi kontradiksi yang padahal tidak semua kehidupan sosial di Papua selalu berkonflik dan bermasalah. Tatkala pemahaman ini menimbulkan masalah lainnya seperti perlakuan diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya. Mahasiswa-mahasiswa Papua ini diusir paksa oleh aparat dan ormas dari tempat tinggalnya. Selain itu, diskriminasi yang dimaksud juga bisa dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diatur terkadang tidak relevan dan aspiratif, terutama lemahnya pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di tingkat provinsi dan daerah. Kenyataannya bagi komunitas lokal di Papua, hal ini tidak mengalami perubahan berarti bagi Papua (Kaisupy, 2021). Justru masyarakat Papua semakin mengkritisi kinerja pemerintah yang tidak membawa hasil apapun bagi perubahan Papua.

3. Kesenjangan Sosial di Papua

Adanya pemerataan pembangunan di setiap sektor kehidupan adalah langkah pasti dalam memperkecil kesenjangan yang ada. Tidak meratanya suatu pembangunan membuat adanya kesenjangan dan alienasi di masyarakat (Sitorus, 2021). Kesenjangan yang dialami masyarakat bisa melahirkan konflik, dan ketidakpercayaan yang berujung pada hasutan propaganda negatif terhadap pemerintah. Kondisi sosial di Papua memperlihatkan kesenjangan yang signifikan bila dibandingkan dengan kondisi sosial di provinsi lain. Kesenjangan sosial menjadikan Papua sebagai provinsi yang rendah dalam kemajuan daerahnya. Inilah bentuk inkonsistensi pemerintah Indonesia untuk memajukan Papua setara perkembangannya dengan provinsi lain.

Kesenjangan tampak di setiap aspek dan telah memarginalisasi masyarakat Papua dengan masyarakat di daerah lain. Kesenjangan ini adalah bukti suatu hal mengalami

ketimpangan pada berbagai aspek. Dalam teori struktural fungsional, Emile Durkheim menyatakan bahwa ketimpangan sosial tidak dapat dihindari (Susan, 2019). Sebab peran-peran memainkan fungsi dalam masyarakat (Nurhayati, 2022). Peran-peran dalam masyarakat inilah yang sering disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga dampaknya terjadi ketidakstabilan. Hal ini menjelaskan alasan mengapa terjadi kesenjangan sosial di Papua. Ada beberapa kesenjangan yang menjadi masalah sosial utama di Papua, di antaranya sebagai berikut.

a. Kesenjangan ekonomi

Meski Papua menghasilkan sumber kekayaan alam di Indonesia seperti gas, minyak, emas, dan tambang lainnya, tetapi sebagian masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor, seperti korupsi, regulasi dan kebijakan yang tidak terarah kepada rakyat. Eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu demi memberikan keuntungan, berbalik fakta cukup jauh. Nyatanya beberapa eksploitasi dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi pihak tersebut. Kegiatan ini menciptakan dampak negatif dan tidak ada manfaat yang dirasakan oleh langsung oleh masyarakat Papua.

b. Kesenjangan layanan publik

Kesenjangan ini merujuk pada akses yang seharusnya diterima masyarakat, contohnya pendidikan, kesehatan, dan fasilitas. Pendidikan, kesehatan dan fasilitas di Papua sulit dijangkau dan tidak memadai (Tambaip, 2023). Terlihat dari gambaran kehidupan masyarakat Papua yang jauh dari kata modern. Untuk akses menempuh pendidikan dan kesehatan pun masyarakat harus menempuh cukup jauh lokasinya dari tempat tinggal. Di samping itu, didapati tingkat melek huruf di Papua juga rendah (Azizah, 2022).

c. Kesenjangan Hak Asasi Manusia

Problematika HAM di Papua seringkali menjadi pokok pembahasan utama yang tidak pernah ada titik terang. Kekerasan, pembunuhan dan pemerkosaan seringkali ditemukan tetapi tidak ada solusi terbaik yang dapat menyelesaikannya. Hal ini mempengaruhi asumsi masyarakat Papua dalam mendapatkan hak kebebasan berpendapat dan keadilan hukum yang hakiki. Setiap progres pemerintah untuk mendukung HAM di Papua selalu berlainan perspektif dengan apa yang diharapkan masyarakatnya.

Salah satu faktor pasti yang menciptakan kesenjangan sosial adalah korupsi. Korupsi menimbulkan ketimpangan ekonomi di masyarakat, ini termasuk kejahatan white collar crime dan harus ditindak dengan tegas (Rosyidin, 2009). Pada dasarnya korupsi dan suap dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan publik. Regulasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bersih tidak berjalan dengan baik. Korupsi menimbulkan tidak stabilnya setiap sistem-sistem sosial di masyarakat, dan membawa dampak serius terhadap masyarakat. Hal ini membuat kekayaan terkonsentrasi pada kepentingan sekelompok kecil dan menciptakan kondisi kehidupan antara kaya dan miskin (Hasibuan, 2023).

Salah satunya contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, ia terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 1 miliar. Tentunya peran Lukas Enembe sebagai Gubernur orang asli Papua (OAP) malah melakukan tindakan yang

merugikan negara dan masyarakat Papua. Peran di masyarakat yang disalahgunakan sebagai petinggi negara membuat disfungsi sosial dan berpengaruh pada keutuhan masyarakat. Fakta Lukas Enembe mengakibatkan kehidupan masyarakat di Papua tetap di garis kemiskinan. Apa dilakukan oleh Lukas Enembe tidak membawa perubahan dengan mendongkrak ekonomi masyarakat Papua sendiri.

4. Penanganan Konflik dan Masalah Sosial di Papua

Konflik dan masalah terjadi bila persaingan dan perbedaan tidak dapat dikomunikasikan dengan baik. Penanganan yang aktif mampu meredam konflik dan menemukan solusi bagi suatu masalah. Studi menjelaskan faktor terhambatnya pembangunan di Papua adalah karena kurangnya penanganan aktif dari pemerintah daerah maupun pusat (Renyaan, 2019). Dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah diharapkan segera membuka dialog Jakarta-Papua. Hal ini pun diorasionkan di berbagai kalangan organisasi masyarakat, khususnya masyarakat Papua.

Konflik OPM dengan pemerintah terus menjadi masalah utama yang tidak pernah hilang. Tuntutan OPM memang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, namun setidaknya langkah ini menurut beberapa kalangan dinilai cukup efektif. Kehadiran pemerintah dalam dialog diharapkan berperan sebagai mediator yang dapat memberikan pemahaman kesadaran kepada OPM (Labomo, 2014). Kesadaran ini mengingatkan bahwa konflik hanya menimbulkan kerugian dan korban di kedua belah pihak. Di samping itu meski dalam pandangan politik yang berbeda, pemerintah dapat mendengar aspirasi dan menemukan solusi terbaik. Cara seperti ini akan meminimalisir sikap protes dan ketidakpuasan yang berujung pada konflik.

Pembangunan infrastruktur di Papua juga perlu melibatkan berbagai *stakeholder*, tokoh adat, tokoh pemuda, komunitas dan masyarakat dalam membangun komunikasi intensif secara holistik. Tujuannya agar setiap proyek pemerintah selalu membawa manfaat yang berarti bagi masyarakat Papua. Secara tidak langsung pemerintah telah berkomitmen demi menciptakan kondisi Papua lebih baik dari saat ini. Stratifikasi sosial yang ada tidak akan menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat Papua karena setiap golongan saling memberikan masukan. Upaya ini akan menjaga persatuan rakyat tetap utuh serta menstabilkan pertahanan dan ketahanan nasional.

Berbicara pendekatan militer pun memiliki kelebihan dan kekurangannya, hal itu juga perlu diperhatikan dan dievaluasi. Pendekatan tersebut memang memiliki kelebihan dalam menekan tindak separatisme dan menutup ruang gerak kelompok tersebut. Tetapi pendekatan ini juga memiliki kekurangan yakni risiko konflik akan terus bertambah. Penggunaan kekuatan militer berdampak pada situasi tidak aman meski alasannya untuk keamanan. Beberapa kalangan masyarakat berpendapat pendekatan militer tidak efektif untuk jangka Panjang (Ismail, 2020).

Masalah korupsi dan suap di Papua semakin memperburuk citra para petinggi negara di mata masyarakat. Seolah memperkeruh keadaan yang belum terselesaikan dengan benar. Pemerintah perlu menindak tegas para pelaku tersebut, dan benar-benar mengawasi serta mengawal aktif pemerintahan yang bersih. Penanganan korupsi dilakukan dengan cara berikut.

- a. Pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempertahankan otsus Papua sebagai bagian dari integral wilayah Indonesia.
- b. Penanaman perspektif baru dalam cara pandang masyarakat Papua bahwa anarkisme kemerdekaan adalah tindakan mengganggu kedaulatan dan ancaman untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Pemerintah harus berpikir positif menilai aspirasi masyarakat sebagai kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga arah pengambilan keputusan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa demokrasi itu dijalankan dengan baik.

Langkah-langkah konkret ini pastinya akan lebih tepat dan langsung berfokus ke masalah utama. Penting untuk mengidentifikasi penyebab konflik dan masalah, tentunya setiap solusi akan memberikan hasil yang memuaskan dan signifikan di masa depan.

Simpulan

Konflik dan masalah sosial di Papua adalah masalah yang begitu kompleks. Konflik yang terjadi dimulai dari sejarah panjang awal berdiri, muncul ideologi baru, hingga kegagalan politik yang berdampak pada ketimpangan dan ketidakadilan bagi rakyat Papua. Francis menyatakan bahwa konflik menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Azharghany, 2019). Konflik berarti pertentangan, pertentangan muncul dalam bentuk ide maupun fisik antara dua belah pihak yang berseberangan, demikian juga dengan masalah sosial. Dari penjelasan di atas, penulis telah merangkum simpulan beberapa hal yang menjadi pokok utama pembahasan yaitu 1) Ketidakpuasan atas otsus dan pengelolaan sumber daya alam di Papua lebih mengarah kepada kepentingan pemerintah pusat, tetapi tidak memberikan manfaat yang cukup bagi masyarakat setempat. Masyarakat Papua merasa bahwa otsus yang diberlakukan tidak memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengelola wilayah mereka sendiri. 2) Diskriminasi dan pelanggaran HAM sering terjadi di Papua dan ini memunculkan suatu perselisihan. Masyarakat Papua selalu mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pemerintah. Di samping itu, kekerasan dan konflik seringkali muncul dari tindakan yang tidak humanis oleh aparat kepada masyarakat. 3) Keterlibatan pihak luar memang mempengaruhi kehidupan sosial di Papua. Hadirnya pihak tersebut seharusnya membawa manfaat untuk kehidupan masyarakat Papua, namun tidak. Alhasil tanah dan kekayaan alam mereka dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok tertentu, dan bukan lagi kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat Papua, kelompok etnis non-Papua dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang berkelanjutan. Keterbukaan dialog untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan sosial adalah bentuk keadilan dan perhatian. Implementasi kebijakan pemerintah dengan memperhatikan prinsip HAM secara inklusi sosial akan menjaga keutuhan integrasi dan persatuan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adi, Y. P. P. A. (2022). Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Vanuatu Terkait Dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM). *Lex Privatum*, 10(5).
- Al Hasyim, M. M. (2017). Diplomasi Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Penjagaan Kedaulatan NKRI di Papua Barat Periode 2013-2016 (bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 51-65.
- Azharghany, R. (2019). PERDAMAIAN DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA (strategi dakwah multikulturalisme dalam pertentangan laten Radikalisme dan Bias Konflik). *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(2), 28-47.
- Azizah, R. N., & Ramadhani, S. A. Tidak Meratanya Persebaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Berpengaruh pada Konflik di Wilayah Papua. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 105-112.
- Elisabeth, A. (2021). *Mosaik Cenderawasih-Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ester Zonggonau, D. (2023). *PROSES TRANSFORMASI PEMERINTAH DESA MULIA KENCANA, DISTRIK IWAKA, KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Fanggidae, I. G., & Yuanjaya, P. (2016). Menelusik kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat. *Natapraja*, 4(1).
- Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading. *Society*, 7(2), 83-100.
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454-461.
- Hari Purwanto, S. H. (2021). *Gejolak Papua dalam Perspektif Intelijen*. Jakad Media Publishing.
- Hasibuan, R. U., & Sahdila, R. (2023). PENGARUH DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Managemen dan Akuntansi*, 1(6), 750-756.
- Ismail, A. (2021). Tinjauan Yuridis Penetapan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Teroris. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 11(2), 23-52.
- Ismail, R. (2020). Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Ambon. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2), 451-469.
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses negosiasi konflik papua: dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82-98.

- Labolo, M. (2014). *Desentralisasi Asimetrik Di Indonesia (Peluang, Tantangan & Recovery)*. Wadi-Press.
- Matildha, M. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI KELOMPOK TERORIS. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1).
- Mindari, E. S. (2022). Analisis Studi Kasus Konflik Papua Merdeka Menggunakan Sudut Pandang Paul Feyerabend. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 2(2), 63-68.
- Moento, P. A., Wuniyu, F., & Betaubun, W. L. (2020). Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua. *Jurnal Noken (Ilmu-Ilmu Sosial)*, 6(1).
- Nurhayati, Cucu dkk, 2022. *Teori Perubahan Sosial Edisi 4*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Pamungkas, C., & Rusdiarti, S. R. (Eds.). (2017). *Updating Papua Road map: proses perdamaian, politik kaum muda, dan diaspora Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Partini dkk, 2022. *Masalah-Masalah Sosial Edisi 4*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Parwitaningsih dkk, 2019. *Pengantar Sosiologi Edisi 2*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Pedrason, R. P. R. (2021). *Tantangan Intelijen di Papua Menghadapi Evolusi Gerakan Papua Merdeka*. Jakad Media Publishing.
- Renyaan, B. M. S., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2019). Efektivitas Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Freeport Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- ROSYIDIN, M. U. C. H. A. M. A. D. (2009). *KEDUDUKAN DAN PERAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sefriani, S. (2015). Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 538-565.
- Septiadi, M. A., Sofa, N. G., Syarah, S., Shakira, W., & KKB, K. (2022). KEKEJAMAN KKB PAPUA YANG MELANGGAR HAM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 273-185.
- Setiawan, D. P., & Fauzi, M. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KASUS BULLYING PADA ANAK AUTIS. *Jurnal Disabilitas*, 1(2), 35-40.
- Sihaloho, R. A. H. (2023). NARASI DIALOG DAMAI PAPUA-JAKARTA DALAM BINGKAI KETAHANAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA. *Masyarakat Indonesia*, 48(1), 93-103.
- Sitorus, G. H., Pasaribu, N., & Sukabdi, Z. (2021). Kesenjangan Sosial Sebagai Akar Propaganda Gerakan Separatis-Terrorisme Di Papua. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(3), 138-150.
- Soeprapto, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi 2*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Sugianto, D. (2017). Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah Pada Tahun 2014-2015 Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(2), 35-47.
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 73-89.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi konflik: teori-teori dan analisis*. Kencana.
- Susetyo, B. (2020). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Papua Tahun 1949-1963. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2(1), 113-127.
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan di Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 101-110.
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik*. Cv. Azka Pustaka.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.